

IKUT TANGGULANGI COVID-19
Golkar Bagi APD, Bantu Pasien Isolasi Mandiri

WONOSARI (KR) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gunungkidul menggelar aksi mendukung pencegahan maupun penanganan Covid-19. Kegiatan ini sebagai bentuk menindaklanjuti instruksi Ketua Umum DPP Golkar dan DPD Golkar DIY.

Tim membagikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada masyarakat di Gunungkidul. Baik itu masker hingga handsanitizer. Selain itu juga membantu pasien yang melaksanakan isolasi mandiri.

”Berdasarkan pantauan lapangan, masih ada pasien isolasi mandiri yang belum mendapatkan bantuan pemerintah. Tahap awal diserahkan bantuan makanan, nutrisi telur dan susu untuk pasien 21 KK yang isolasi mandiri di Gebang, Panggang,” kata Ketua DPD Golkar Heri Nugroho SS di Kantor DPD Golkar, Selasa (19/1).



KR-Dedy EW

Heri Nugroho dan tim bersiap tanggulangi Covid-19.

Turut hadir Anggota Fraksi Golkar DPRD DIY Hj Rani Widayati MM dan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul Eri Agustin MM, Gunawan SE, Sarjana SE dan Jumiran SE. Pelaksanaan pencegahan Covid-19 berupa penyemprotan dan pembagian masker menyasar Pasar Trowono dan fasilitas umum lain.

Melalui pembagian APD maupun bantuan bagi pasien isolasi mandiri diharapkan akan dapat ikut

mendukung penanggulangan Covid-19.

”Bahkan seluruh anggota Fraksi Golkar, pengurus, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) siap untuk menerima vaksin. Program ini sebagai bentuk kepedulian dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Agar nantinya mampu mempercepat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya. (Ded)-f

ASAL SESUAI REGULASI BUPATI SAMBUT BAIK
Rencana Pengolahan Minyak ’Jelantah’



KR-Asrul Sani

Bupati Sutedjo (kiri) menerima jajaran PT TAA.

WATES (KR) - Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo, menyambut baik tawaran kerja sama pengolahan minyak jelantah dari salah satu perusahaan yang bergerak dalam pengumpulan, pengolahan dan redistribusi limbah minyak jelantah, PT TAA.

Pemerintah Kabupaten (pemkab) setempat berharap dengan adanya pengolahan minyak tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai ekonomis meskipun sudah jadi limbah.

”Pemkab mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan eko-

nomi masyarakat, yang perlu dipikirkan regulasinya agar kerjasama yang dibangun bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Untuk kepentingan tersebut perlu kajian mendalam terkait regulasinya,” kata Bupati Sutedjo saat menerima audiensi manajemen PT TAA di Ruang Menoreh, kantor bupati setempat, Wates, Senin (18/1).

Sementara itu Pimpinan PT TAA, Aji mengatakan, pihaknya tertarik pengelolaan minyak jelantah

karena bernilai profit sehingga akan memberi manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

”Sebagian masyarakat masih menganggap minyak jelantah limbah dan tak bernilai ekonomis. Padahal sebenarnya masih bisa digunakan dan bernilai ekonomis. Perlu edukasi bagi masyarakat terkait manfaat dan nilai ekonomi minyak jelantah,” ungkapnya menambahkan minyak jelantah akan diolah sebagai bahan baku BioDiesel dan produksi komersial lain yang diregulasi pemerintah.

”Pengelolaan minyak jelantah juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Agar lebih optimal maka pengelolaannya bekerja sama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat secara langsung. Namun teknisnya nanti akan menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan regulasi,” ujarnya. (Rul)-f

MEMBASMI HAMA TANAMAN
RPT Gunungkidul Kenalkan Penggunaan APH

WONOSARI (KR) - Regu Pengendali Perlindungan Tanaman (RPT) Gunungkidul mengkampanyekan penggunaan Agen Pengendali Hayati (APH). Untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman secara umum. Anggota RPT Kapanewon Paliyan Budi Susilo, Sabtu (16/1) mengungkapkan, gerakan pengendalian hama dan tanaman menggunakan APH telah dilaksanakan di Paliyan, Patuk, Rongkop, Semanu, Playen dan Tanjungsari. ”Hal ini untuk mengurangi pestisida,” kata Budi Susilo.

Diungkapkan, memang untuk diterima masyarakat penggunaan APH tidak mudah. Namun hal tersebut menjadi tantangan RPT untuk mengubah petani yang terbiasa menggunakan produk kimia un-

tuk sedikit demi sedikit mulai mengurangnya.

”Hasil penggunaan APH tidak bisa terlihat dengan cepat layaknya pestisida. Tetapi butuh waktu. APH yang dikembangkan siap digunakan untuk jamur, wereng, belalang, dan ulat serta hama serangga yang lain,” ujar Budi.

Sementara itu salah satu petani asal Grogol, Paliyan, Supriyono mengaku sepakat dengan RPT. Bahkan dirinya telah merintis pertanian dengan pupuk organik selama dua tahun belakangan ini di lahan miliknya. ”Pupuk lebih dominan pakai pupuk kandang. Memang belum 100% pupuk kimia saya tinggalkan, tetapi tidak lagi sebanyak dulu,” ucapnya.

(Ded)-f

Masih Ada BLT Dana Desa

WATES (KR) - Pemerintahan Kalurahan diminta segera melakukan perubahan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 2021 yang tidak mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Perubahan APBKal 2021 menyusul diterbitkannya Peraturan Kementerian Desa (Kemendes) tentang Prioritas Penggunaan DD 2021.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) se-Kulonprogo di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) Kulonprogo, Senin (18/1).

”Kalurahan ditargetkan sudah menetapkan keputusan kalurahan, sekaligus melaporkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD ke Pemkab pada minggu ketiga Januari 2021,” ujar Jumarno, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMDP2KB Kulonprogo.

Menurutnya, kalurahan di Kulonprogo tidak mengalokasikan BLT DD 2021 karena Permendes diterbitkan belakangan setelah kalurahan menetapkan APBKal 2021. Adanya Permendes tersebut,

kalurahan harus menggelar musyawarah khusus dan melaporkan data calon KPM BLT DD di wilayahnya.

Pada Permendes nomor 13/2020, katanya tidak mengatur persentase DD yang diterima setiap kalurahan dialokasikan untuk BLT DD.

Permendes mengatur BLT DD diberikan selama 12 bulan dengan besaran bantuan tiap KPM Rp 300 ribu per bulan. yang hendak diverifikasi dengan mendasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial,” ujar Jumarno.

Kepala Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMDP2KB Kulonprogo, Joko Sunanto menjelaskan data calon KPM BLT DD yang dilaporkan kalurahan, hendak diverifikasi dengan mendasarkan DTKS.

BLT DD yang disalurkan kalurahan, katanya diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu wilayah di kalurahan bersangkutan. Yaitu KPM di luar penerima bantuan PKH, sembako, pra kerja, bantuan sosial dan program bantuan sosial dari pemerintah lainnya. (Ras) -f

PEMKAB DIMINTA MEMBANTU

3 Persoalan Sekolah Swasta

PENGASIH (KR)-Ada tiga persoalan yang tengah dihadapi sekolah swasta di Kabupaten Kulonprogo, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik, rendahnya upah guru serta sulitnya memperoleh siswa baru. Pemkab diminta turun tangan untuk membantu penyelesaian masalah itu.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulonprogo, Mawardi mengungkapkan hal itu dalam audiensi di DPRD Kulonprogo, Senin (18/1). Hadir lembaga pendidikan swasta baik dari Majelis Dikdasmen PDM,

Lembaga Pendidikan Ma’arif PC NU, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Yayasan Bopkri, Yayasan Pendidikan Kanisius, Yayasan Sekolah Minggu Budha Vijjarama, maupun

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dari audiensi ini berharap pemkab dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

”Minimnya jumlah SDM, khususnya tenaga pendidik di sekolah swasta terjadi sejak 2014 lalu dengan ada kebijakan dari pemerintah terkait penarikan guru negeri dari sekolah swasta. Dampaknya sekolah berstatus swasta kekurangan tenaga pengajar. Sekolah swasta sebelum tahun itu tidak begitu kesulitan seperti

saat ini,” keluhnya.

Arif Prastowo SSos MSi Kepala Disdikpora Kulonprogo menjelaskan, pihaknya akan mengidentifikasi berapa jumlah pendidik dan tenaga di sekolah swasta.

”Data angka sudah ada tetapi belum diklasifikasi lebih lanjut. Kewenangan Disdikpora adalah mendaftarkan dan menghitung kebutuhan tenaga pendidik. Dan terkait PPPK itu merupakan kewenangan pusat,” papar Arif.

Keluhan dari para penyelenggara pendidikan swasta tersebut diharapkan Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati SE segera ditindaklanjuti pemkab. Disdikpora diminta mendaftarkan jumlah guru di sekolah swasta untuk kemudian dihitung berapa kekurangan tenaga pengajar. (Wid)-f

MINGGU KE-2 PSTKM PENYEBARAN COVID-19 MENINGKAT
Peran Gugus Tugas Kapanewon Perlu Ditingkatkan

WONOSARI (KR) - Meskipun Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) sudah memasuki minggu kedua tetapi pergerakan Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul masih terus terjadi dengan kecenderungan meningkat berdasarkan update yang dilakukan Dinas kesehatan setempat.

Selama empat hari penambahan kasus terkonfirmasi positif ada 95 kasus dengan riwayat penularan akibat melakukan kontak dengan terkonfirmasi positif (keluarga), riwayat perjalanan maupun penularan akibat kerumunan. ”Dari kumulatif selama empat hari terbayak terjadi pada Jumat (15/1) lalu penambahan kasus mencapai 40 orang tersebar di Kapanewon



KR-Bambang Purwanto

Operasi Yustisi di Pasar Hewan Siyonoharjo.

Wonosari, Karangmojo, Semanu, Playen Panggang, Semin, Tanjungsari, Ponjong dan Kapanewon Paliyan,” kata Kadinkes Gunungkidul dr Dewi Irawaty MKes, Selasa (19/1).

Dengan meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 ini pihaknya berharap dukungan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar terus dila-

kukan.

Senin (18/1) pasien sembuh 27 orang dan meninggal 1 orang. iKalau jumlah total pasien positif sejak pandemi Korona ada 1.221 orang, sembuh 920 orang dan jumlah meninggal dalam kumulatif sebanyak 47 orang,” ucapnya.

Sedangkan Kapolres Gunungkidul AKBP Agus Setyawan SIK mengata-

HARI JADI KE-68 DPRD

Jadi Pemacu Semangat untuk Konsisten Tiga Fungsi Dewan

PENGASIH (KR)-Hari jadi ke-68 DPRD Kulonprogo dapat menjadi pemacu semangat para legislator untuk terus konsisten dalam menjalankan tiga fungsi dewan. Jangan sampai muncul niatan tidak untuk kesejahteraan masyarakat.

”Ketiga fungsi dewan meliputi legislasi, berkaitan pembentukan peraturan daerah, kewenangan penentuan APBD, dan fungsi pengawasan dalam mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, serta kebijakan pemerintah daerah,” kata Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo se usai menghadiri rapat paripurna Hari Jadi ke-68 DPRD Kulonprogo, Selasa (19/1).

Dalam kegiatan hari jadi, DPRD Kulonprogo selain menggelar rapur, sebelum-

nya juga mengadakan anjarsana ke sejumlah mantan bupati Kulonprogo, apresiasi kepada kalurahan dan kapanewon yang tertib dalam hal pembayaran PBB, anggota dan fraksi yang tingkat kehadirannya dalam berbagai rapat paling tinggi, serta lomba foto fraksi dengan tema wisata Kulonprogo.

DPRD Kulonprogo selama ini, lanjut Sutedjo, sudah baik menjalankan tiga fungsi itu. Ketugasan itu diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga bisa membawa kemajuan bagi Kulonprogo. ”Peranan legislatif sebagai mitra eksekutif sudah berjalan baik. Genap 68 tahun DPRD Kulonprogo makin menunjukkan kedewasaan berpolitik, sinergitas yang terbangun, tanpa mengurangi sikap kritisnya,” ujar Sutedjo.



KR-Asrul Sani

Bupati Sutedjo (kanan), Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE serta Wabup Fajar Gegana (kiri).

Hari jadi ke-68, menurut Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE, menjadi momen penting untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota dewan, apalagi melaksanakan tiga fungsi utama.

”Dalam rangka pengawasan kami awasi pelaksanaan seluruh program

APBD baik implementasi maupun dampak outputnya. Kami juga sinergi dalam rangka anggaran untuk kepentingan masyarakat. Pembuatan perda kami usahakan untuk menghasilkan keputusan legal standing sesuai kebutuhan saat ini,” tandasnya. (Wid/Rul)-f

Budidaya Magot, Optimis Kulonprogo Bebas Sampah

KOKAP (KR) - Kabupaten Kulonprogo optimis ’zero waste’ (bebas sampah) bisa terwujud, setelah ditemukan kembali solusi untuk mengatasi permasalahan sampah, khususnya jenis organik. Bertambahnya solusi, berbagai cara dapat ditawarkan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

”Keberadaan sampah

anorganik teratasi dengan mendorong masyarakat agar menjadi nasabah bank sampah terdekat, sedang sampah organik bisa dikelola mandiri. Mengolah sampah organik, sejak pertengahan 2020 sudah digalakkan pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dan Eco Enzyme (EE). Kini, diperkenalkan solusi baru yang mungkin bagi sebagian kalangan belum

familier,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulonprogo Drs Sumarsana MSi,

Senin (18/1).

Menurutnya, solusinya adalah dengan budidaya magot (belatung). (Wid)-f



KR-Widiastuti

Meninjau budidaya magot (belatung).

"MULIA"			
AUTHORIZED MONEY CHANGER			
www.muliamoneychanger.co.id			
PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID - 19			
➤ GRAND INNA MALIOBORO HOTEL JL.MALIOBORO 60 YOGYAKARTA			
TEL P : 0274 - 547 688 DAN 563314			
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB			
➤ PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND			
TEL P : 4331272			
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB			
➤ JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA			
TEL P : 0274 - 5015000			
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB			
TANGGAL 19/JAN/2021			
CURRENCY	BELI/		JUAL
	BN	TC	
USD	14.025	-	14.275
EURO	16.950	-	17.200
AUD	10.775	-	11.025
GBP	19.000	-	19.500
CHF	15.650	-	16.000
SGD	10.675	-	11.025
JPY	134,50	-	139,50
MYR	3.400	-	3.600
SAR	3.625	-	3.975
YUAN	2.085	-	2.235
Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah			
Menerima hampir semua mata uang asing			